

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

**WIDO ZUWIK**

**1421020037**

**Prodi : Siyasah**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
2020/1441 H**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

**WIDO ZUWIK**

**1421020037**

**Prodi : Siyasah**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H**

**Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
2020/1441 H**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis tentang konsep pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 menurut peraturan perundang-undangan dalam hukum positif serta kajian fiqh siyasah. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa: apakah ada terdapat kekurangan-kekurangan atau pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggarannya kampanye baik administrasi berupa audit dana kampanye sampai etika kampanye seperti kampanye hitam/sering disebut (*black campaign*). Pada Pasal 48 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye memiliki Prinsip pokok pengaturan, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip transparansi mengharuskan partai politik dan calon bersikap terbuka terhadap semua proses pelaksanaan kampanye. Begitupun pelanggaran etika kampanye berupa *Black Campaign*, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dimedia massa dan media sosial, tentang penyebaran fitnah, pemberitaan bohong, isu uang (*Money politic*) dengan yang dibagi-bagi kepada masyarakat Provinsi Lampung. Menurut UU No. 32 tahun 2008 tentang pemilu dan di pertegas dalam UU No. 42 tahun 2008 pada bagian keempat larangan dalam kampanye pasal 41 (1) pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

**Kata Kunci : FIKH SIYASAH, HUKUM POSITIF, PELAKSANAAN KAMPANYE**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

---

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wido Zuwika

NPM : 1421020037

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : *Syari'ah*

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan referensi yang dibuat dalam teks. Jika dikemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



**Wido Zuwika**  
**NPM. 1421020037**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Bandar Lampung Telp: (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018.**

**Nama : Wido Zuwilka**

**NPM : 1421020037**

**Jurusan : Siyasah**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Raden-Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**

**NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II**

**Dr. Javusman, M.Ag**

**NIP. 197411062000031002**

**Mengetahui:**

**Ketua Prodi Siyasah Syar'iyah**

**Frenki, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018"** disusun oleh, Wido Zuwika NPM 1421020037 program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Hari/Tanggal: Senin, 09 Maret 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Henry Irwansyah, M.A.

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.

Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.

NIP 196210221993031002

## MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya: Setiap kamu adalah pemipin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang kamu pimpin.*

*(HR. Bukhari dan Muslim)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah subhanauwata'ala, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang memberikan makna dalam hidup saya, terutama bagi :

1. Ibunda saya Dra. Hj. Wiwik Darwati yang telah membesarkan, membimbing dan mengasuh saya dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan motivasi dan mendoakan untuk dapat mewujudkan cita-cita agar menjadi anak yang berguna bagi agama, Nusa dan Bangsa. Serta Ayahanda saya Alm. Zulkarnain yang InsyAllah diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
2. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada saya selama menempuh perkuliahan sampai selesai. Terkhusus Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku Pembimbing II yang tidak ada hentinya mendoakan dan mendorong saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih saya ucapkan.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi wadah sekaligus tempat menimba ilmu baik secara Akademis maupun Aktivis.



## RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Wido Zuwika dilahirkan di Kota Bengkulu, Kecamatan Ratu Samban, Provinsi Bengkulu pada tanggal 03 Maret 1996 anak pertama dari pasangan Bapak Zulkarnain dan Ibu Dra. Hj. Wiwik Darwati. Penulis memiliki satu saudara kandung yang bernama Wiga Dwi Gustian.

Penulis memulai pendidikan di SD Muhammadiyah Kota Metro, lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Kartikatama Kota Metro, selesai pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan ke MAN 1 Metro, selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun melanjutkan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah jurusan Siyasa Syar'iyah tahun 2014.

Kemudian Organisasi yang pernah diikuti, organisasi Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kota Metro, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah (DEMA-F Syari'ah), UKM Puskima, UKM ORI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala punji bagi Allah Subhana Wa Taala yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya karena hanya dengan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya.

Selama penulisan skripsi ini, banyak pihak yang membantu baik saran maupun dorongan, sehingga kesulitan-sulitan dapat teratasi. Sehubungan dengan bantuan perbagai pihak tersebut maka melalui skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Frengki, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, pengetahuan, masukan, dan membimbing penulis.
4. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai selesai.

5. Kawan-kawan seperjuangan (Ridwan Saputro, S.Pd, Ganda Rusman Maulana, S.Pd, Aditya Niko, S.E, Ridho Agung Juantara, S.Pd, Eky Rahmansyah, Arif Prasetyo, Achmad Junaedy, Irfan Noviansyah, Ghani Aulia, A.Md., Andrie MK, S.H, Febriantoni, S.Sos dll). Kawan-kawan seperjuangan Siyasah angkatan 2014 khususnya Siyasah kelas D yang telah memberikan banyak bantuan baik moril maupun materil, motivasi dan wawasan selama masa perkuliahan dikampus.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dengan ikhlas dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhana Wa Taala. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi jauh dari sempurna, tetapi penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun kearah yang lebih baik senantiasa penulis harapkan.

Bandar Lampung,                      Maret 2020  
Penulis

**WIDO ZUWIK.**  
**NPM. 1421020037**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.....</b>	<b>12</b>
A. Pelaksanaan Kampanye menurut Hukum Positif.....	12
B. Pelaksanaan Kampanye menurut Fiqh Siyasah .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran umum Provinsi Lampung.....	46
B. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 .....	52
C. Pengaturan Dana Kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 .....	65
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>72</b>
A. Pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 .....	72

B. Pelaksanaan kampanye Pilgub Lampung 2018 ditinjau menurut Hukum positif dan Hukum Islam ( <i>fiqh Siyasah</i> ) .....	74
---	----

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Judul Skripsi ini adalah: “TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018”. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul tersebut diatas maka saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut. Berikut istilah yang ada dalam judul ini antara lain :

Tinjauan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tinjauan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tinjauan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Fiqh Siyasah, adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014), h. 4.



Mekanisme Kampanye, adalah sebuah tindakan dan upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik melakukan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian<sup>2</sup>.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah pemilihan kepala daerah dalam wilayah provinsi dimana menjadi wakil pemerintah dalam lingkup provinsi setempat. Secara arti harafiah nya Gubernur di artikan sebagai pemimpin, penguasa atau yang memerintah.

KPU Provinsi Lampung, adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia dalam koridor wilayah provinsi lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan saya memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Obyektif**

Dalam masa kampanye pemilihan gubernur lampung 2018, saya selaku penulis merasakan banyaknya isu dari berbagai bentuk golongan yang menyudutkan benar dan salah dalam pelaksanaan kampanye tersebut. Sehingga saya bermaksud menjelaskan dalam skripsi ini tentang

---

<sup>2</sup> Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu". *Jurnal Resolusi*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018), h. 7.

bagaimana pelaksanaan kampanye yang tepat dalam ajang berdemokrasi, yang juga akan di teliti dengan proses pengkajian kembali melalui data-data tertulis dari buku, jurnal dan juga ditambah dengan wawancara terhadap instansi yang bersangkutan.

## 2. Alasan Subyektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Siyasah. Serta tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya.

## C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan Pancasila, demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri, yang diimplementasikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup> Salah satu ciri bahwa Indonesia menganut demokrasi dalam pelaksanaan kebangsaan dan kenegaraan ialah dengan adanya Pemilihan Umum (PEMILU).

Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan lembaga legislatif yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, pemilihan eksekutif yaitu Pemilihan Presiden (PILPRES) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi dan Bupati/Walikota, yang dilakukan secara terpisah dengan membagi sesuai

---

<sup>3</sup> Arifin Anwar, *Pencitraan dalam Politik* (Jakarta : Pustaka Indonesia, 2006), h. 39.

kelembagaan yaitu tahap daerah Provinsi, dan Bupati/Walikota. Demokrasi merupakan proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan bupati dan walikota, sampai kepada pemilihan kepala desapertama pemilu legislatif, tahap kedua pemilu eksekutif yaitu pemilu Presiden dan tahap ketiga yaitu pemilihan kepala.<sup>4</sup>

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama atau berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, atau calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Tetapi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, atau calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, haruslah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mencalonkan diri ke KPU yang telah ditentukan oleh undang-undang, adapun syarat yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 7 ayat 2 huruf (g) yang menyatakan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan yaitu “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan jika yang berkedudukan sebagai tersangka tidak bisa memenuhi syarat sebagai calon peserta pilgub, karena harus ditetapkan berdasarkan putusan

---

<sup>4</sup> Al-Adalah, Vol. XII, No. 2 Desember 2014, h. 253-254.



pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya masih dilindungi oleh asas praduga tak bersalah.

Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Berdasarkan PKPU No.4 tahun 2017 tentang mekanisme kampanye sudah jelas tentang tata cara pelaksanaan kampanye yang baik dan benar, menurut prosedur yang ditetapkan oleh KPU RI. Namun dalam kesempatan ini saya sebagai penulis akan menjelaskan tentang beberapa peraturan tersebut, yang mana pada saat Pilgub Lampung 2018 lalu sempat menjadi suatu pro kontra atas kurangnya penindak lanjutan dalam mekanisme kampanye di lapangan yang diduga menyalahi aturan yang ditetapkan. Perlu kita ketahui bersama tentang beberapa hal yang familiar dapat dikatakan sebagai pelanggaran kampanye, seperti :

1. Pemasangan APK yang tidak sesuai ukuran dan design KPU
2. Melakukan kampanye di rumah ibadah dan tempat pendidikan
3. *Money Politic* dan lain sebagainya

Poin diatas memang beberapa contoh bentuk pelanggaran kampanye yang sering kita temukan di Indonesia, namun lain daripada hal tersebut masih cukup banyak poin yang mungkin lebih terperinci dalam pembahasan pelaksanaan kampanye yang menjadi judul skripsi ini. Pada dasarnya kampanye adalah bentuk komunikasi secara tidak langsung antara pasangan

calon terhadap masyarakat, oleh sebab itu poin yang berada di setiap media maupun momen kampanye selalu bersifat membangun. Dalam proses berkampanye adalah sebagai strategi dalam menilik sekaligus mengambil perhatian dan hati masyarakat yang menjadi suara pemilih, namun seringkali pula diberbagai kesempatan terjadi pelanggaran akibat hilangnya potensi jujur dan adil dalam proses berkampanye. Pada masa Pilgub Lampung 2018 yang lalu sempat diduga adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye seperti contoh money politik, yang mana hal tersebut memang sudah terasa seiring membudaya di negeri ini.

Dalam pelaksanaan kampanye terlebih dahulu disosialisasikan oleh KPU terhadap partai ataupun pasangan calon, tentang poin-poin apa saja yang perlu diikuti dan yang dilanggar, sehingga dalam proses pelaksanaan kampanye diharapkan benar-benar menjadi ajang demokrasi yang sehat. Adapun temuan yang diduga melanggar atau menyalahi aturan dalam proses berkampanye, maka diharuskan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kepada partai politik atau pasangan calon berupa teguran peringatan sampai dengan pendiskualifikasian. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye dapat dikatakan bukan hanya dikerjakan oleh KPU sendiri, melainkan dibantu oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai badan pengawasan dalam proses pemilihan umum. Masyarakatpun perlu ikut andil serta berperan dalam memantau jalanya proses kampanye dalam pemilihan umum, apabila didapati adanya kecurangan maka masyarakatpun memiliki kewajiban dan

hak untuk melaporkan hal tersebut kepada pengawas pemilu yaitu BAWASLU baik dikecamatan, kabupaten kota ataupun Provinsi serta RI.

Pemerintahan Islam Khalifah dibantu oleh para wali yang bisa disebut sebagai Gubernur untuk mengurus wilayah atau provinsi, wali diangkat oleh Khalifah untuk mengurus wilayah untuk menerapkan konsep sentralisasi. Wali diangkat oleh khalifah bukan dalam artian pelimpahan seluruh wewenang seluas-luasnya seperti yang terjadi pada konsep otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan wali diatur Khalifah, bisa jadi wali diangkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat kecuali urusan harta (*al imarah „ala assalah*), atau mengurus masalah harta saja atau mengurus kedua-duanya. Dalam ajaran Islam juga diperintahkan untuk memberikan jabatan atau kekuasaan kepada orang yang mampu memegang suatu amanah tersebut berdasarkan kompetensi dan integritasnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An Nisa 4 : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalam ayat ini Allah menyampaikan amanat dan bersikap adil di dalam menentukan hukum karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian hukumi serta mengetahui apa yang kalian lakukan di dalam menyampaikan amanat

tersebut. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.<sup>5</sup>

Apabila orang yang ditunjuk mengundurkan diri dari jabatannya, kedudukan dirinya sebagai pengganti imam (khalifah) tidak serta merta gugur hingga imam (khalifah) melakukan pertimbangan. Jika ada orang lain yang bisa mengganti posisinya, pengunduran diri orang yang ditunjuk dapat diterima. Selanjutnya, orang yang ditunjuk mengundurkan diri kemudian imam (khalifah) menyatakan penerimaannya. Namun jika tidak ada orang lain yang layak menjadi pengganti imam (khalifah), pengunduran diri dari orang yang ditunjuk dan penerimaan imam (khalifah) atas pengunduran dirinya sama-sama tidak sah. Karena itu, penunjukkan atas pengganti imam (khalifah) harus didukung oleh dua pihak, yaitu pihak penunjuk dan pihak yang ditunjuk<sup>6</sup>.

Dalam proses berkampanye diharapkan menjadi suatu bentuk pembelajaran politik bagi masyarakat dalam proses pencapaian suatu tujuan yang dilakukan perseorangan atau kelompok dengan maksud menanamkan kepercayaan kepada orang lain untuk dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum. Masyarakat saat ini masih belum terlalu mampu menilai nilai positif

---

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Misbah : Peran Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"* (Jakarta : Lentera Hati, 2009), h. 581.

<sup>6</sup> Imam Al-Mawardi, *"Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diiniyyah"* (Beirut : Daar El-Kitab Al-Araby, 422-467 H), h. 23

dalam aktivitas kampanye. Masih banyak pula masyarakat yang menganggap bahwa kampanye merupakan suatu ajang politik yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok dengan bersifat negatif atau akal-akalan. Maka dari itu lewat karya tulis berupa skripsi ini saya ingin meninjau secara hukum positif dan fiqh siyasah proses kampanye yang sebenarnya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018?
2. Bagaimana pandangan Hukum positif dan Hukum Islam (*fiqh Siyasah*) terhadap pelaksanaan kampanye Pilgub Lampung 2018?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penyusunan karya ilmiah ilmiah sesuai judul diatas ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum kampanye dalam islam.
2. Untuk mengetahui kajian fiqh siyasah terhadap pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018
3. Untuk mengidentifikasi apakah proses pelaksanaan kampanye Pilgub Lampung 2018 sudah sesuai dengan PKPU
4. Untuk mengidentifikasi apakah ada ketimpangan atau kejaangalan dalam proses pelaksanaan kampanye Pilgub Lampung 2018 yang tidak sesuai dengan PKPU

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoritis, diharapkan menambah wawasan penulis tentang bagaimana pelaksanaan kampanye Pilgub Lampung 2018.
2. Dari segi praktis, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan kampanye yang benar dan tidak menyalahi aturan baik dari segi tinjauan hukum positif atau maupun tinjauan dari segi fiqh siyasah.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian, penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu penelitian yang menggunakan data baik dengan buku, jurnal dan lainnya.
2. Sifat Penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya melukiskan variabel demi variabel atau satu demi satu secara sistematis bagaimana pelaksanaan kampanye yang sesuai aturan PKPU No.4 tahun 2017.<sup>7</sup> Selain dari itu skripsi ini juga bersifat analisis, artinya pengambilan kesimpulan dengan cara membandingkan dua hal atau variable untuk mengetahui selisihnya.<sup>8</sup>
3. Sumber Data
  - a. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder umumnya berupa, bukti catatan, atau

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h, 23-24

<sup>8</sup>*Ibid*, h, 119



laporan historis.<sup>9</sup> Adapun data yang penulis gunakan adalah buku-buku serta referensi lain yang mendukung penulisan skripsi ini.

- b. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara bertahap yang dikumpulkan melalui buku.<sup>10</sup> Adapun data yang penulis gunakan adalah PKPU No.4 tahun 2017 yang di dapat di Komisi Pemilihan Umum kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan membaca buku, Obsevasi, dan wawancara.

4. Analisis, penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis, karena sebagian sumber data dari penulis berupa informasi teks dan dokumen serta buku-buku. Maka penulis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *analisis content*.<sup>11</sup> Metode ini pula digunakan lantaran penulis melakukan kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisis. Penulis juga menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, lalu penulis melakukan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h, 7

<sup>10</sup>Zeni Yuserli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 6

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004) h, 127

<sup>12</sup>Zeni Yuserli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h, 10

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

#### **A. Pelaksanaan Kampanye Menurut Hukum Positif**

Pada pemilihan umum, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah tak lepas dari aktivitas kampanye. Kampanye memang sudah menjadi hal wajib dalam sebuah pemilu, seperti halnya dua sisi mata uang yang tak dapat terpisah. Kampanye layaknya seperti sebuah doktrin yang memiliki tujuan dalam mendapatkan sebuah bentuk dukungan. Usaha dalam kampanye melibatkan bentuk perseorangan dan kelompok yang terstruktur serta terorganisir untuk mendapatkan pencapaian suatu pengambilan keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif.

##### **1. Pengertian Kampanye Menurut Hukum Positif**

Kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Orang sering mempersamakan kampanye dengan propaganda. Hal ini tidak

sepenuhnya salah karena keduanya memang merupakan wujud tindakan komunikasi yang terencana dan sama-sama ditujukan untuk mempengaruhi khalayak.<sup>13</sup>

Kampanye berfungsi sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye, menurut drs, antar venus, ma, dalam kegiatan kampanye memiliki fungsi berikut ini:

- a. Sebagai sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat.
- b. Sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu.
- c. Pengembangan usaha dengan membujuk khalayak untuk membeli produk yang dipasarkan.
- d. Untuk membangun citra positif peserta kampanye.

Kampanye dan propaganda juga sama-sama menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Jadi pada kenyataannya memang ada beberapa kemiripan diantara kedua konsep tersebut. Kalau pun, kemudian keduanya tampak berbeda, itu karena pendekatan dan metoda yang dipakainya.

Berikut beberapa factor yang menjelaskan perbedaan antara kampanye dan Propaganda

---

<sup>13</sup> Antar Venus, *Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*, Edisi Revisi (Jakarta; Simbiosis Rekatama Media, 2018) h.5

Tabel 1  
Perbedaan Kampanye dan Propaganda

<b>ASPEK</b>	<b>KAMPANYE</b>	<b>PROPAGANDA</b>
Sumber	<i>Selalu Jelas</i>	<i>Cenderung Samar-samar</i>
Waktu	<i>Terikat dan dibatasi Waktu</i>	<i>Tidak terikat Waktu</i>
Sifat Gagasan	<i>Terbuka untuk diperdebatkan khalayak, membuka ruang dialog</i>	<i>Tertutup dan dianggap sudah mutlak benar (self evident)</i>
Tujuan	<i>Tegas, spesifik dan variatif</i>	<i>Umum dan ditujukan untuk mengubah sistem kepercayaan/nilai</i>
Modus penerimaan pesan	<i>kesukarelaan/persuasi</i>	<i>tidak menekankan kesukarelaan, melibatkan paksaan/koersi, dan melakukan manipulasi fakta/pesan.</i>
Modus Tindakan	<i>Diatur kode bertindak/etika</i>	<i>Tanpa aturan etis dan serba boleh</i>
Dasar pembuatan pesan	<i>Pesan dijustifikasi dengan data hasil riset</i>	<i>Pesan umumnya dikonstruksi secara manipulatif</i>
Sifat kepentingan	<i>Mempertimbangkan kepentingan</i>	<i>Kepentingan sepihak</i>

Kampanye kerap dinilai lebih bersifat persuasif karena disertai bujukan dan iming-iming. Sementara propaganda, sekalipun dasarnya sangat persuasif, kerap disertai tekanan berupa penonjolan dari dampak buruk yang bisa terjadi jika massa tak bertindak seperti apa yang dipropagandakan. Secara umum, Schramm mengartikan saluran kampanye sebagai “perantara apapun yang memungkinkan pesan-pesan sampai kepada penerima”. Sementara Klingemann dan Rommele secara lebih spesifik mengartikan kampanye sebagai segala bentuk medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada khalayak. Bentuknya dapat berupa kertas yang digunakan untuk menulis pesan, telepon,

dialog public, penyuluhan, poster, spanduk, internet/media sosial, radio dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Sekadar menyamakan persepsi, persuasi yang dimaksud tak lain adalah usaha yang disadari untuk mengubah sikap, kepercayaan atau perilaku orang melalui transmisi pesan. Propaganda sendiri, biasa digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan di dalam suatu. Selain itu istilah propaganda telah dikenal terlebih dahulu dan memiliki konotasi yang negatif sementara istilah kampanye baru memasyarakat pada tujuh puluh tahun terakhir serta memiliki citra positif dan akademis.

Berikut merupakan 7 tata cara pelaksanaan kampanye yang baik :

1) Dilakukan Sesuai Jadwal Kampanye

Setiap kandidat yang telah disahkan KPU untuk dapat menjadi calon dalam sebuah konstetasi panggung politik harus bersikap disiplin, yang dimaksud disiplin disini adalah tepat waktu saat melakukan kampanye. Sebab semua kandidat akan diberikan jadwal oleh KPU untuk melaksanakan kampanye. Jangan sampai kemudian ada kandiddat yang mencuri start kampaye, sebab dalam tata cara kampanye hal tersebut tidak dibenarkan. Sebab dapat menimbulkan kekisruhan dan mencoreng

---

<sup>14</sup>Ibid, hal.141

nilai demokrasi yang telah di jaga. Curi start kampanye sering dilakukan oleh para kandidat dalam berbagai kesempatan. Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 telah melalui pertimbangan melalui kesepakatan yang diatur undang-undang. Tidak terlepas dari teori Negara hukum yang mengatakan bahwa dalam suatu negara, warga negara harus patuh kepada hukum tertentu, jika hukum itu memuaskan rasa keadilan, kepatuhan itu adalah wajib, kecuali jika menurut pertimbangan warga negara ketidakpatuhan akan lebih banyak memberikan manfaat atau kemakmuran masyarakat.<sup>15</sup>

## 2) Tidak Mengganggu Ketertiban Umum

Tata cara dalam pelaksanaan kampanye yang kedua adalah tidak diperkenankan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Jika dilakukan maka hal ini termasuk kedalam bentuk pelanggaran kampanye yang dapat ditindak. Sebagaimana diketahui bahwa masa kampanye merupakan masa berburu dukungan namun selayaknya jangan sampai kemudian kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh misalnya saja kegiatan membagikan atribut kampanye di jalan. Tentu saja kegiatan tersebut dapat mengganggu aktivitas pengendara dan juga pengguna jalan raya. Bahkan dikhawatirkan dapat menimbulkan

---

<sup>15</sup>S. Endang Prasetyawati, "Analisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 9 No.1, (Maret 2018) h. 68



resiko kecelakaan lalu lintas. Tentu saja hal ini sangat merugikan dan memberikan bahaya bagi para pengguna jalan raya. Maka dari itu, cara kampanye yang baik seharusnya tidak mengorbankan kepentingan umum untuk kepentingan kandidat. Jika kemudian terjadi hal hal yang tak diinginkan maka tentu siapa yang akan bertanggung jawab.

### 3) Mendapatkan Izin dari Aparat Keamanan

Kampanye merupakan sebuah kegiatan yang sedikit berisiko. Sebab antara kubu A dan B bisa saja terjadi bentrok akibat dari sifat fanatisme dan rasa mendukung salah satu kandidat yang sedang bertarung. Oleh sebab itu maka dalam setiap penyelenggaraan kegiatan kampanye harus mendapatkan izin dari aparat keamanan setempat. Hal ini tentu juga merupakan sebuah jaminan dimana kegiatan akan dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Pada faktanya banyak sekali kerusuhan yang kemudian terjadi hingga menimbulkan korban jiwa akibat dari kegiatan kampanye tanpa izin dan pengawasan aparat. Sebab rasa fanatisme yang tinggi dalam mendukung seorang kandidat dapat membuat pendukung bersifat anarkis. Bahkan dapat melakukan tindakan kekerasan akibat dari fanatisme yang berlebihan ini. Maka disitulah peran aparat keamanan dalam menjaga situasi agar tetap kondusif.

#### 4) *No Sara*

Kampanye bermuatan isu sara kini bukan merupakan hal yang baru. Sebab cara ini dinilai paling efektif untuk memenangkan hati para umat Islam sebagai pemilik suara mayoritas. Namun pada kenyataannya kampanye bermuatan sara sangatlah tidak sesuai. Sebab agama dan politik selayaknya tidak dijadikan satu. Karena keduanya terpisah sehingga tidak dapat dicampur adukan. Ketika urusan agama dan politik disandingkan maka akan dapat menimbulkan kekisruhan. Pada akhirnya akan dapat menimbulkan permusuhan antara kubu-kubu yang saling mendukung. Kampanye sara menjadi salah satu strategi yang memang cukup efektif memenangkan hati kaum muslim. Namun tentu saja sebagai negara demokrasi hal ini bertentangan dengan nilai dan ajaran kebebasan. Bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan demokrasi. Kebebasan untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilu juga merupakan kebebasan yang berlaku kepada semua umat beragama.

#### 5) *Bukan Black Campaign*

Kampanye hitam adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok. Target-target umumnya adalah para jabatan

publik, politikus, kandidat politik, aktivis dan mantan suami. Istilah tersebut juga diterapkan dalam konteks lainnya seperti tempat kerja. Kampanye hitam tidak didasarkan pada fakta, dan cenderung berupa fitnah yang berpotensi mengarah pada tindak pidana. Black campaign lebih brutal, lebih serampangan, menuding pasangan lain tanpa menyajikan fakta yang ada. Kampanye hitam juga menjurus kepada fitnah dan kebohongan tentang lawan politik. Kampanye hitam ini jelas dilarang oleh Undang-undang.

#### 6) Tidak Berorasi Berlebihan

Orasi (bahasa Inggris Pertengahan: oracion) adalah sebuah pidato formal, atau komunikasi oral formal yang disampaikan kepada khalayak ramai. Antonim dari orasi adalah mencetak (print), menulis (writing). Orasi bermacam-macam, ceramah merupakan salah satu bagian dari orasi, pidato, kultum, bahkan puisi merupakan bagian dari orasi, tetapi saat ini kata orasi mengalami penyempitan makna dan terkesan bermakna peyorasi, orasi dikenal di kalangan umum sebagai bentuk ungkapan melalui verbal yang disampaikan pada khalayak umum dan memiliki sifat persuasif. Dalam kampanye, orasi merupakan sebuah hal yang wajar. Namun tentunya terdapat tata cara orasi yang dibenarkan. Seperti misalnya tidak diperbolehkan orasi menggunakan kata kata bermuatan negatif menuingunga agama, ras dan suku lawan

politik. Sebab jika demikian maka tentu hal tersebut bukan lagi merupakan bentuk orasi melainkan adalah suatu bentuk penghinaan terhadap lawan politik.

#### 7) Menciptakan Suasana Politik yang Kondusif

Tata cara kampanye yang terakhir adalah dengan menciptakan suasana politik yang kondusif. Sehingga tentunya meskipun persaingan memanas namun kedua kubu masih menggunakan cara cara yang elegan dalam berpolitik. Sejatinya demokrasi adalah sebuah bentuk kebebasan namun jangan menyalah artikannya kepada tindakan yang dapat berbuat sebebas bebasnya. Sebab dalam pelaksanaan kampanye setiap kandidat harus berpatokan kepada peraturan yang telah dirumuskan oleh KPU selaku penyelenggara resmi pemilu.<sup>16</sup>

## 2. Sejarah Kampanye

Kampanye sebenarnya telah ada sejak era pemilihan umum dalam dunia politik. Seringkali kampanye dimulai oleh sudut pandang yang kurang beruntung atau anti kemapanan (seperti terhadap kepentingan yang lebih kuat). Fenomena kampanye ini erat terkait dengan kelompok-kelompok pemilik kepentingan dan partai politik demokrasi masyarakat memiliki kampanye pemilihan biasa, tetapi kampanye politik dapat terjadi pada isu-isu tertentu bahkan di non-demokrasi selama kebebasan berekspresi diperbolehkan. Kampanye pemilu amerika di abad ke-19

---

<sup>16</sup>Puput Purwanti, *Hukum, Politik, Sara, Militer, Nasional & Internasional*, HuKamnas, 2018

menciptakan massa-basis partai politik pertama dan menciptakan banyak teknik kampanye massa.

Dalam catatan sejarahnya kampanye memang sudah sama tuanya dengan sejarah pemilu. Barangkali kita tidak pernah terlintas untuk mengukur apakah kampanye yang dilakukan selama ini efektif ataukah tidak. Kampanye seolah telah menjadi *conditio sine qua non* dari pemilu. Tak peduli kampanye itu berpengaruh ataukah tidak pada hasil pemilu, apalagi menjawab pertanyaan, berpengaruh ataukah tidak pada masa depan kehidupan rakyat. Apakah rakyat mengerti yang disampaikan lewat kampanye, ataukah justru kampanye telah menjadi entitas yang terpisah untuk memenuhi egonya sendiri yang identik dengan mengumbar dana besar, pengerahan massa, hura-hura, yang ujungnya untuk kekuasaan.

Tujuh puluh tahun yang lalu yang lalu banyak sarjana Komunikasi yang masih mempercayai kesimpulan keliru tentang kampanye. Mereka berpendapat bahwa berkampanye lewat media massa hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan mengubah perilaku publik. Pada masa itu ada 2 buah artikel yang sering dikutip untuk membuktikan ketidakefektifan kampanye. Artikel *pertama* bertajuk, “some reason why communication campaign fail” yang ditulis oleh hyman dan sheatsley pada tahun 1947. Artikel *kedua* berupa laporan hughes (1950) tentang kegagalan kampanye mengenai perserikatan bangsa-bangsa di Cincinati-

Ohio USA. Kedua tulisan ini sempat mematikan semangat para ilmuwan komunikasi untuk mengaji dan menerapkan kampanye selama puluhan tahun, bahkan membuat mereka mengabaikan fenomena kampanye.<sup>17</sup>

Memasuki paruh kedua dasawarsa tahun 70an minat untuk menguji kampanye marak pakar komunikasi memancarkan harapan baru akan potensi kampanye dalam mendorong perubahan sosial dan prospeknya bagi penelitian komunikasi. Optimisme semacam itu berkembang terutama setelah hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh mendelsohn, dipublikasikan semua laporan penelitian tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa sebuah kampanye yang dikonstruksi dengan baik akan memberikan efek yang luar biasa terhadap khalayak sasarannya. Masa ini kemudian dikenal sebagai era kesuksesan kampanye.

Pada masa ini ahli komunikasi menyadari bahwa efek kampanye lebih bersifat moderat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada kondisi tertentu sebuah prgram kampanye berpeluang besar untuk sukses namun pada keadaan lain program tersebut gagal. Mereka juga menyadari bahwa keberhasilan sebuah kampanye sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku kampanye dalam merancang program dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada.

Hal ini sepenuhnya sejalan dengan pendapat robert e. Simmons (1990) , professor ilmu komunikasi dari universitas boston amerika

---

<sup>17</sup>Ibid, hal.3

serikat, yang menegaskan bahwa keberhasilan mencapai tujuan kampanye banyak ditentukan oleh kemampuan kita dalam merancang, menerapkan dan mengevaluasi program kampanye secara sistematis dan strategis. kemampuan semacam itu, lanjut Simmons, harus dilandasi oleh pemahaman teoretis terhadap berbagai dimensi kampanye serta kecekapan teknis dalam menerapkannya.

### **3. Dasar Hukum dan Aturan dalam Pelaksanaan Kampanye Menurut Hukum Positif**

Menurut pasal 1 ayat 15 PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, "*Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.*" Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah purpose to something atau disebut juga kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Sedangkan menurut Imawan mengungkapkan kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham



atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.<sup>18</sup>

Sementara pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto adalah sebagai berikut: “*campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior* (kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).

Merujuk pada definisi- definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivitas kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:

- a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu,
- b. Jumlah khalayak sasaran yang besar,
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.<sup>19</sup>

Pengawasan terhadap kampanye di Pilgub 2018 dilakukan oleh Bawaslu di tiap tingkatan, juga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang berisikan anggota Bawaslu, polisi dan jaksa. Dalam

---

<sup>18</sup>Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 223

<sup>19</sup>*Ibid*, h.233

PKPU nomor 4 tahun 2017 disebut tujuan kampanye adalah meningkatkan partisipasi pemilih, sehingganya kampanye oleh kandidat atau parpol dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) pertemuan terbatas,
- 2) tatap muka atau dialog,
- 3) pemasangan bahan kampanye,
- 4) pemasangan alat peraga kampanye,
- 5) kegiatan lain yang tak melanggar aturan.

Larangan dalam kampanye Pilgub 2018 diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 68 dan 74 UU Pilkada, yang sebagaimana disebutkan berikut :

#### Pasal 68

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk NKRI;
- b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan;
- c) Menghasut, memfitnah dan mengadu domba;
- d) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan;
- e) Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Mengancam dan menganjurkan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
- h) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah;
- i) Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU;

- j) Menggunakan Tempat ibadah atau Pendidikan; dan
- k) Pawai berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.

#### Pasal 74

- a) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf **a** sampai dengan huruf **i** dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf **j** dan huruf **k** dikenai sanksi.

#### **4. Macam-macam Kampanye Menurut Hukum Positif**

Seperti yang kita ketahui bahwa kampanye merupakan suatu bentuk tujuan setiap calon baik legeslatif maupun eksekutif mendapatkan perhatian serta hasil terbaik dalam kontestasi demokrasi. Setiap pelaksanaanya memang memiliki karakter masing-masing. Kali ini dalam hokum positif terdapat beberapa macam bentuk kampanye, dilihat dari isinya dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

##### **a. Kampanye Positif**

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung berisi pengenalan tentang produk atau seseorang yang dikampanyekan. Pada umumnya informasi yang disampaikan tentang hal-hal baik saja, mengenalkan calon pemimpin secara pribadi, program kerja dan visi misinya. Bentuk kampanye ini

bisa berupa slogan, baliho, iklan tv, dialog, wawancara ataupun debat. Kampanye inilah yang harus dilakukan oleh para calon. Kenyataannya baik calon, tim dari calon pemimpin sangat jarang membahas ini, justru yang lebih dilakukan adalah mengkampanyekan kekurangan lawan.

b. Kampanye Negatif

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya. Kampanye negatif biasanya dilakukan oleh kompetitor dimana isi kampanyenya menyampaikan tentang kekurangan produk atau seseorang. Pada umumnya kampanye negatif ini berdasarkan data dan fakta yang sudah terjadi sebelumnya.<sup>20</sup>

c. Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter dan cenderung fitnah. Isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat hukuman, minimal dapat sanksi dari KPU jika tim calon kandidat pemilu melakukan kampanye ini. Dan masih banyak lagi kampanye hitam jenis ini. Namun yang menarik disini kadang kampanye dilakukan oleh pihak yang sama yang dilakukan dimedia-media.

---

<sup>20</sup>Maxmanroe.com, 2019, “*Pengertian Kampanye Secara Umum, Tujuan, Fungsi, dan Jenis-Jenis Kampanye*”,

Kampanye hitam dilakukan untuk mengangkat citra baik dimata pemilih untuk meraih simpati. Tetapi kampanye juga berpotensi memberikan citra buruk dimata setiap konstituen. Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gosip yang mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut Black Campaign cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan.

Secara harfiah Black Campaign bisa diartikan sebagai kampanye kotor, yakni kampanye untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan isu negatif yang tidak berdasar. Dahulu kampanye hitam ini juga dikenal sebagai whispering campaign, yakni kampanye melalui mulut ke mulut, namun sekarang ini kampanye tersebut mengalami perubahan modus dengan menggunakan media massa sebagai penyebar informasi.

Dalam pertandingan politik seperti ini, kadang juga kita mengenal istilah kampanye hitam. Kampanye hitam atau black campaign adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok (Jay C, 2002). Orang-orang yang menjadi target umumnya merupakan para politikus, jabatan publik, aktivis dan tentunya kandidat politik

lain. Istilah kampanye hitam ini juga sering digunakan dalam hal lain yang lebih umum seperti dalam persaingan kerja.

Kampanye hitam muncul karena persaingan yang panas dalam kampanye. Istilah lain menyatakan bahwa kampanye hitam merupakan penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumor tentang seorang calon disebarkan kepada masyarakat/ calon pemilih. Hal ini dilancarkan agar menimbulkan persepsi negatif / yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.<sup>21</sup>

## 5. Model Kampanye

Tahap kegiatan kampanye meliputi model-model kampanye seperti:

### a. Tahap Identifikasi

Merupakan tahap penciptaan identitas kampanye agar dengan mudah dapat dikenali khalayak. Identitas dengan penggunaan simbol, warna, lagu atau jingle, seragam dan slogan.

### b. Tahap Legitimasi

Dalam kampanye politik diperoleh ketika seseorang telah masuk dalam daftar kandidat Legislatif. Legitimasi mereka bisa efektif digunakan dan dipertahankan sejauh mereka dianggap capabel dan tidak menyalahgunakan jabatan. Dalam kampanye

---

<sup>21</sup>Siti Fatimah, 2018, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", *Jurnal Resolusi*, Vol.1 (Juni 2018)

produk, legitimasi ditunjukkan melalui testimoni atau pengakuan konsumen tentang keunggulan produk tertentu.

c. Tahap Partisipasi

Tahap partisipasi ini bersifat nyata atau simbolik. Partisipasi nyata ditunjukkan oleh keterlibatan orang-orang dalam menyebarkan pamflet, brosur atau poster, menghadiri demonstrasi yang diselenggarakan sebuah lembaga swadaya masyarakat atau memberikan sumbangan untuk perjuangan partai.

d. Tahap Penetrasi

Pada tahap ini seorang kandidat, sebuah produk atau sebuah gagasan telah hadir dan mendapat tempat di hati masyarakat. Sebuah produk telah menguasai sekian persen dari pangsa pasar yang ada. Seorang juru kampanye telah berhasil menarik simpati masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa ia adalah kandidat terbaik dari sekian yang ada. Sebuah kampanye yang ditujukan untuk menentang kebijakan pemerintah mendapat liputan media massa secara luas dan mendapat tanggapan serius pemerintah dengan membuka dialog untuk mencari jalan keluar terbaik.

e. Tahap Distribusi

Tahap pembuktian, pada tahap ini tujuan kampanye pada umumnya telah tercapai. Kandidat politik telah mendapatkan kekuasaan yang mereka cari, sebuah produk sudah dibeli



masyarakat atau kampanye kenaikan harga tarif tol telah disetujui pemerintah.<sup>22</sup>

## **B. Pelaksanaan Kampanye Menurut Fiqh Siyasah**

Hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat muslim dibagi menjadi tiga kategori, yaitu hukum *syariat*, hukum *fiqh* dan *siyasah syar'iyah*. Walaupun ketiganya berbeda pengertian namun memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya.<sup>23</sup> Dalam kesempatan ini saya khusus membahas tentang pelaksanaan kampanye dalam pespektif *fiqh siyasah*, dimana kita lihat diatas bahwasannya pengertian fiqh dan siyasah sudah berbeda tapi masih berkaitan satu sama lain.

Dalam pelaksanaan kampanye menurut fiqh siyasah dapat diartikan bahwasanya pelaksanaan kampanye tersebut didasari menurut hukum (*fiqh*) atau upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) dalam mengatur, mengurus dan memerintah; pemerintahan, politik atau pembuatan kebijaksanaan (*siyasah*).<sup>24</sup>

### **1. Pengertian Kampanye menurut Fiqh Siyasah**

Kampanye menurut para pakar siyasah menyifatkan kampanye sebagai bentuk sifat retorik, ada beberapa prinsip moral yang ditetapkan syari'ah berkenaan dengan kampanye retorik menurut mereka antara lain: *Pertama*, prinsip jujur dan benar dalam berkomunikasi dengan orang banyak, prinsip ini merujuk kepada ketentuan syari'ah yang

---

<sup>22</sup>Drs. Bono Setyo, M.Si, "Profetik", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 06, No. 2, (Oktober 2013)

<sup>23</sup> Iqbal Muhammad, "*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta; Prenadamedia Group, 2014), hal.1

<sup>24</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-shadr, 1999), hal.108

menganjurkan semua muslim harus berlaku jujur dan benar. Ini berkaitan dengan firman Allah:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “tidak suatu ucapanpun yang diucapnya, melainkan ada di dekatnya pengawas yang selalu hadir”. (Q.S. Qaf: 18).

Rasulullah saw. telah bersabda: “terdapat tiga ciri orang munafik; apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia memungkiri, dan apabila diberi amanah ia mengkhianati”.<sup>25</sup> “Siapa saja yang mati dalam keadaan berdusta kepada kaumnya maka ia tidak akan dapat mencium bau syurga”.<sup>26</sup>

Dengan demikian prinsip kejujuran menjadi faktor utama dalam setiap kampanye pemilu bagi ummat Islam. Tidak boleh berbohong untuk menarik banyak suara kepada partai kita, tidak boleh mengancam agar semua orang menyusuk partai kita, tidak boleh memberi suap agar orang banyak memihak kepada kita, dan tidak boleh menghalalkan cara untuk mendapatkan satu kursi di parlemen sebagaimana yang terjadi pada zaman sebelumnya.

Dalam kampanye setiap peserta harus bisa mendapatkan sesuatu yang baru sebagai ilmu baru dari hasil kampanye tersebut, karena kampanye merupakan satu jenis pendidikan tidak resmi buat masyarakat. Karena itu pula tidaklah seorang juru kampanye memberikan pendidikan yang tidak bermoral kepada peserta kampanye karena itu akan berakibat fatal bagi kehidupan bangsa di masa depan. Ia bukan hanya sekedar bersorak sorai ketika seorang jurkam berkampanye dengan berapi-api,

<sup>25</sup> Muhammad Mukhsin Khan, Shahih Bukhari, “Madinah: Dar Ahya Us-Sunnah al-Nabawiya”, *Kitab Iman, hadis nomor 32*, Vol. 1, hal 31.

<sup>26</sup> Ahmad bin Yahya al-Baladhuri, “*Futuh al-Buldan*”, (Beirut: Dar al-Nashr li al-Malayin, 1957), hal., 635.

tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang disampaikan jurkam tersebut menyentuh kepentingan rakyat atau tidak, sesuai dengan ketentuan Islam atau menyimpang daripadanya.

*Kedua*, tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan. Sabda Rasulullah saw. “Darah, harta benda dan kehormatan setiap orang Islam adalah haram diganggu”. Muhammad Nasir al-Din al-Albani dan Mohammad Hashim Kamali mengupas hadis ini lebih lanjut masing-masing dalam bukunya; Riyadh al-Shalihin dan The Dignity of man The Islamic Perspectives. Merujuk kepada dua poin di atas jelaslah bagi kita bahwa perkara-perkara polemik politik, dakwaan yang tidak berazas dan semua jenis kekerasan dalam kampanye pemilu adalah diharamkan oleh syari’ah. Untuk terlaksananya tata cara kampanye pemilu yang serasi dengan ketentuan syari’ah, maka pihak berkuasa negara mayoritas ummat Islam harus merujuk sepenuhnya kepada ketentuan Islam dalam operasional kampanye pemilu tersebut.

a. Pengeluaran Dana

Berkenaan dengan pengeluaran dana untuk kepentingan pemilu, terdapat berbagai pendapat para ulama fiqih yang agak bervariasi. Kebanyakan ulama kecuali ulama Hambali berpendapat bahwa membelanjakan uang untuk merebut jabatan hakim atau anggota legislative dan eksekutif adalah sah kalau perbelanjaan seumpama itu diperlukan. Namun demikian ulama golongan Maliki mempunyai pendirian yang lebih tegas seperti yang tercatat dalam

kutipan ini; “Membelanjakan uang untuk merebut jabatan hakim hanya sah dalam tiga keadaan: pertama; jika perbelanjaan itu perlu, karena jabatan tersebut tidak bisa diperoleh tanpa mengeluarkan uang; kedua; kalau pembelanja mengatakan akan timbul persoalan ummah apabila ia tidak memegang jabatan tersebut; ketiga; jika ia yakin bahwa hak dan tanggung jawab akan hilang kecuali ia menjadi hakim atau penguasa. Pengeluaran uang dilarang untuk tujuan yang lain. Kebenaran penggunaan uang seperti yang tersebut di atas adalah berdasarkan andaian bahwa calon yang bersaing dalam hal itu sudah mempunyai moral atau akhlaq yang mulia serta mementingkan kepentingan atau kemaslahatan ummah”.

b. Islam dan Kampanye

Di dalam fikih siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi.<sup>28</sup> Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek

---

<sup>27</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), h. 128.

<sup>28</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 29.

yang baik untuk menyakinkannya.<sup>29</sup> Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam fikih siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kampanye Menurut Fiqh Siyahsah

Berbicara tentang kontekstual Fiqh Siyasah maka jelas merujuk kepada hokum atau aturan Agama Islam. Islam sendiri selalu menarik dasar atau rujukan lewat Al-Qur'an dan Sunnah. Sebelum membahas kedudukan dasar hukum kampanye dalam perspektif fiqh siyasah, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hokum islam (*fiqh*) secara sistematis. Secara global hokum islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu hokum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya seperti shalat, puasa, zakat serta haji dan hubungan manusia antar sesamanya seperti perekonomian, jual beli, perjanjian, hutang piutang, pidana dan perkawinan (*munakahat*).<sup>31</sup>

Dalam hal ini jelas bahwasanya kampanye masuk kedalam fiqh yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya, karena dalam kampanye terdapat intisari penawaran jual beli yang memiliki pola yang sama dengan aktivitas kampanye dalam rangka mengejar keuntungan

---

<sup>29</sup> Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Palanta, 2007), h. 482.

<sup>30</sup> Mahomed Ullah Ibn S. Jung, *The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990), x.

<sup>31</sup> Subhi Mahmashani, *Falsafah al-tasyri fi al-islam*, (kairo; Dar al-kasysyaf) hal.23

dan perjanjian, seperti contoh menawarkan diri dengan membawa visi dan misi yang dijanjikan untuk dapat dilaksanakan. Di dalam fikih siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>32</sup>

Dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi.<sup>33</sup> Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya. Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam fikih siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui

---

<sup>32</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), hal.128.

<sup>33</sup> Antar Venus, *"Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hal. 29

pelaksanaan pemilihan umum.<sup>34</sup> Kampanye lekat dengan pengenalan diri serta perilaku penawaran yang menggunakan orang atau calon sebagai subjek penawaran tersebut. Penawaran diri untuk menjadi pemimpin telah diatur dalam Firman Allah Q.S Yusuf Ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya : Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi (w. 1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan).<sup>35</sup> Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut. Akan tetapi Selain itu Islam juga tidak menggalakkan ummatnya untuk mempromosikan personalitas dirinya agar dipilih oleh rakyat pada jabatan tertentu. Karena cara seumpama itu lebih dekat kepada sikap ambisi pribadi yang mengejar jabatan yang dilarang Islam.

<sup>34</sup>Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan....., *Op.cit*, hal.229

<sup>35</sup>Fahmi Huwaydi, "Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*", (Bandung: Mizan, 1996), hal. 236.

Sabda Rasulullah saw: “Jangan sekali-kali kamu meminta untuk menjadi pemimpin, kecuali diberikan dengan cara yang wajar maka terimalah, kalau diberikan dengan cara yang salah maka tolaklah” (Bukhari dan Nasa-i).

Pernah Abu Zar al-Ghifari yang terkenal khusyu’ dan wara’ coba meminta posisi pemimpin pada Rasulullah saw. Karena Rasulullah merasa beliau tidak serasi untuk memperoleh posisi tersebut maka Baginda tidak memberikannya, alasan Beliau tidak mengabulkan permintaan Abu Zar karena beliau meminta jabatan bukan diberikan dengan wajar, dan personalitas beliau menurut Nabi tidak cocok untuk dipromosikan di sana.

Karenanya seseorang yang berkampanye kepada orang banyak serta meminta rakyat untuk memilihnya, itu berarti identik dengan meminta jabatan pada rakyat dengan perasaan ambisi. Berpijak kepada hadis Nabi dan kasus Abu Zar al-Ghifari maka langkah tersebut sudah keluar dari tradisi Nabi, keluar dari tradisi tersebut bermakna keluar dari ketentuan Islam. Namun manakala kita kembali kebelakang mengingat tidak ada peraturan baku tentang kampanye dalam Islam, sementara atribut politik hampir seluruh Negara modern hari ini menggunakan sistem pemilu untuk menentukan kepemimpinan Negara, maka langkah tersebut masih bisa dievaluasi lebih lanjut.

Artinya para calon barangkali dibolehkan berkampanye asalkan harus menggunakan rambu-rambu agama Islam baik yang berkenaan



dengan ‘aqidah, maupun akhlaq. Siapa saja bisa mengemukakan program kerja untuk kemuslihatan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, ketika ia terpilih maka program kerja tersebut harus benar-benar dilaksanakan, walaupun tidak sanggup atau gagal maka ia harus minta ma’af pada rakyat yang memilihnya. Berpolitik dalam Islam dengan cara yang benar merupakan bahagian dari ‘ibadah sementara berpolitik jahat ala Machiavelli yang menghalalkan segala cara menjadi bahagian dari jinayah atau kriminal. Kalau poin terakhir yang kita lakukan maka tempat akhir nanti adalah neraka.

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik disebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.

Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik (*al-Hizb al-Siyasi*), seperti hak untuk memilih, hak untuk

mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.<sup>36</sup> Di dalam syariat Islam, telah disebutkan didalamnya tentang batasan-batasan hak-hak politik individu. Adapun hak-hak politik tersebut diantaranya adalah Hak Memilih (Haqq al-Intikhab); Hak Musyawarah (Haqq al-Musyawarat); Hak Pengawasan (Haqq al-Muraqabat); Hak Pemecatan (Haqq al-‘Azl); Hak Pencalonan (Haqq al-Tarsyih), dan; Hak Menduduki Jabatan (Haqq Tawalliy al-Wazha-if al- ‘Ammat). Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada Hak Pencalonan dan Hak Menduduki Jabatan.

### **3. Sejarah Pemilihan Gubernur dalam Islam**

Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Banyak permasalahan yang timbul dari dalam dan luar daerah, dibutuhkan penanganan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk pelaksanaan tugas tugas eksekutif, Abu Bakar melakukan pembagian kekuasaan dikalangan sahabat senior. Abu Bakar mengangkat tiga orang sahabat, yaitu ‘Ali, ‘Usman, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekertaris negara yang berkedudukan di Madinah. Untuk memegang keuangan Abu Bakar menunjuk Abu ‘Ubaidillah sebagai bendahara, sedangkan Hakim agung di serahkan kepada ‘Umar bin Khattab.

Untuk membantu tugas-tugas daerah, Abu Bakar meneruskan pola Nabi SAW mengangkat para Gubernur sebagai kepala

---

<sup>36</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam *Syar’iyyah al-Intikha* (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), h. 17.

pemerintahan. Pengangkatan Gubernur ini dilakukan dengan di tunjuk atau diutus oleh Abu Bakar untuk menjadi Wakil Khalifah di tiap tiap daerah<sup>37</sup>. Mereka adalah :

- a. ‘Utab ibn Asid (Mekkah)
- b. ‘Usman ibn Abi al-‘Ash (Tha’if)
- c. Muhajir ibn Umaiyyah (Shan’a)
- d. Zaid ibn Labid (Hadramaut)
- e. Ya’la ibn Umaiyyah (Khaulan)
- f. ‘Ila ibn Tsur al-Hadrami (.Zabid dan Rima)
- g. Mu’adz ibn Jabal (Janad)
- h. ‘Abdullah ibn Tsur (Jarsy)

Karena dalam masa kehidupan Rasulullah saw tidak pernah ada Pemilihan Umum (Pemilu) seperti hari ini maka otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang. Ini bermakna kita tidak ada rujukan langsung tentang kampanye dalam Islam sebagaimana kampanye yang berlangsung hari ini. Namun Islam punya istilah lain untuk mengembangkan Islam dan ummatnya yang disebut dakwah. Antara dakwah dengan kampanye tentunya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah itu konotasi positif dan dekat dengan pahala sementara kampanye bernuansa negative yang cenderung dikonotasikan akrab dengan neraka. Ini lebih disebabkan oleh

---

<sup>37</sup>Fathiyah Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-islamiyah*, (Kairo; Dar al-Ma’arif,1991), hal.78

kecenderungan-kecenderungan jurkam yang suka berbohong dan inkar janji selama ini.

1) Hak Pencalonan (Haqq al-Tarsyih)

Hak pencalonan ialah tindakan seseorang yang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum lainnya. Di sisi lain, tindak pencalonan diri yang didalamnya mengandung unsur-unsur permintaan akan suatu jabatan tertentu, tentu tidak diperbolehkan secara syariat, Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak.<sup>38</sup>

Pencalonan di Masa Kini, Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan tetapi pencalonan diri sendiri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan darurat) atau demi kemaslahatan shariat. Di masa kontemporer sekarang ini, umat nampaknya tidak mungkin mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang layak dan memperkenalkan calon tersebut kepada umat dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk

---

<sup>38</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik...*, *Op.cit*, h.46.

menjadi pemimpin demi terealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam bernegara.<sup>39</sup> Pencalonan diri ini dibolehkan dengan bersandar pada firman Allah dalam surat Yusuf ayat 55. Di dalam penafsiran ayat tersebut, tidak ada dugaan bahwa Nabi Yusuf a.s. meminta suatu kedudukan karena ketamakannya. Melainkan hal tersebut dilakukan untuk menjadikannya sebagai sarana dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang diridhoi Allah.

Kampanye Pencalonan Apabila pada masa kontemporer ini dalam praktiknya pencalonan boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat. Maka bagi orang yang mencalonkan dirinya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai kampanye pemilihan yang dilakukan dengan memuji-muji dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun, seseorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya sebatas itu saja yang diperbolehkan oleh calon yang mencalonkan diri.

## 2) Hak Menduduki Jabatan (Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-‘Ammat)

Menurut shariat Islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Jabatan-jabatan umum didalam negara bukanlah hak individu atas negara, karena jika itu merupakan suatu hak, maka

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, 47.

permintaan atas suatu jabatan atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan.

Pengisian suatu kedudukan jabatan merupakan kewajiban atas negara. Oleh sebab itu, pemerintahan baik kepala negara dan seluruh pejabatnya harus menseleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan. Dan tidak boleh berbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan atau golongan dari manapun yang tidak ada hubungannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.<sup>40</sup>

Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (al-as}hlah). Nabi bersabda, 'Barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya'.<sup>41</sup> Apabila kepala negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang yang tepat untuk sesuatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih orang yang lebih representatif. Representatif disini memiliki arti yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dan juga, dalam proses penseleksian ini, kepala

---

<sup>40</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik...*, hal. 48

<sup>41</sup> bnu Taimiyah, *Etika Politik Islam, Terj. Rofi' Munawwar dalam Siyasah Syar'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 4.

negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standart kelayakan Al-Quwwah (kekuatan) dan Al-Amanah (kepercayaan).

Di masa kini, kaidah dan standart ketepatan harus ditetapkan dan dilaksanakan. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan penseleksian secara langsung terhadap orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut, maka harus ada penetapan tentang peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat untuk memegang suatu jabatan serta batas minimal kelayakan. Kepada seseorang yang berminat untuk memegang jabatan tersebut, diperkenankan untuk mengajukan surat permohonan yang kemudian dilakukan pemeriksaan atas permohonan mereka dan semua hal yang member petunjuk atas kelayakan dan kepercayaan mereka.<sup>42</sup> Dari prosedur diatas, apabila tim penseleksi dan pemeriksa menemukan seseorang yang layak dan memenuhi syarat, tim penseleksi harus menunjukkannya secara terbuka dan terang-terangan. Hal ini dikarenakan agar terhindar dari nepotisme dan menghindari juga adanya ketidakadilan. Karena, sesungguhnya kekuasaan yang berada di tangan kepala negara dan seluruh pejabat pemerintahan adalah amanat. Allah akan meridhai mereka jika ia melimpahkan jabatan-jabatan kenegaraan umum kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan pedoman syari'at dan tidak melimpahkannya kepada kerabat yang paling dekat serta menjauhi orang yang layak dan cocok.

---

<sup>42</sup>Abdul Karim Zaidan, *"Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam"*, Terj. Abdul Aziz dalam *Al-Fardu wa Al-Daulah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta: yayasan Al-Amin, 1984), h. 50.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Yahya al-Baladhuri, *Futuh al-Buldan*, Beirut: Dar al-Nashr li al-Malayin, 1957
- Al-,*Adalah*, Vol. XII, No. 2 Desember 2014
- Anwar, Arifin, *Pencitraan dalam Politik* (Jakarta : Pustaka Indonesia, 2006),
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, [lampung.bps.go.id/subject/23](http://lampung.bps.go.id/subject/23)
- Based on Minister of Home Affairs Regulation No 39/2015 (Permendagri , No 39 tahun 2015)
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011),
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993),
- Drs. Bono Setyo, M.Si, Jurnal Komunikasi PROFETIK, Vol. 06, No. 2, Oktober 2013
- Efriza, *Political Explore* (Sebuah Kajian Ilmu Politik), Alfabeta CV, Bandung : 2012.
- Fatimah, Siti, 2018, *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, ResolusiVol.1 (ISSN2621-5764)
- Fatimah, Siti, *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018,
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996),
- Ibn Manzhar, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-shadr)
- Ibn S. Jung, Mahomed Ullah, *The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 2004), h. x.
- Ibnu Taimiyah, *Etika Politik Islam*, Terj. Rofi' Munawwar dalam *Siyasah Syar'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),



Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diiniyyah* (Beirut : Daar El-Kitab Al-Araby, 422-467 H), h. 23

Iqbal, Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta; Prenadamedia Group)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014),

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia NOMOR:21/HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017, *Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung 2018*, Jakarta: 2017

Kutipan Wawancara : Bpk. Tio Aliansyah, SH.,MH,(Rabu,31 Agustus 2019)

lampost.co, *Berita Bedah Program Paslon Ideal Gelar Bincang Kandidat*, 06 Februari 2018

lampung.tribunnews.com,

Maxmanroe.com, 2019, *Pengertian Kampanye Secara Umum, Tujuan, Fungsi, dan Jenis-Jenis Kampanye*,

Mukhsin Khan, Muhammad, Shahih Bukhari, Madinah: Dar Ahya Us-Sunnah al-Nabawiya, t.t., vol. 1, Kitab Iman, hadis nomor 32,

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004)

Nabrawi, Fathiyah, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-islamiyah*, (Kairo; Dar al-Ma'arif)

Naryosao, Agus, *Majalah Pengembang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (Universitas Diponegoro. VOL. 36-No.2, Juni 2008),

pariwisatalampung.com/2018/7/10, *Article Lampung: Batas Wilayah Lampung*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2017, Jakarta: 2017

Provinsi Lampung dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2018, ISSN: 0303-1942

Puput Purwanti, *Hukum, Politik, Sara, Militer, Nasional & Internasional*, HuKamnas, 2018

Shihab, Quraish, Tafsir Al-Misbah : *Peran Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2009),

Samuddin, Rapung, Fiqih Demokrasi: *Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013),

Samuddin, Rapung, Fiqih Demokrasi: *Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013),

S. Endang Prasetyawati, Jurnal Keadilan Progresif, *Analisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018*, Vol 9 No.1, 2018

Subhi Mahmashani, *Falsafah al-tasyri fi al-islam*, (kairo; Dar al-kasysyaf)

[teraslampung.com/inilah-peta-politik-pilgub-lampung-2018](http://teraslampung.com/inilah-peta-politik-pilgub-lampung-2018), 28 Desember 2017  
[tribunnews.com](http://tribunnews.com),

Venus, Antar, *Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*, Edisi Revisi (Jakarta; Simbiosis Rekatama Media, 2018)

Wiyono, Eko Hadi, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Palanta, 2007),

[www.lampung.bps.go.id/](http://www.lampung.bps.go.id/)

Zaidan, Abdul Karim, dkk, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif

Ramdhani dalam *Syar'iyah al-Intikha*(Bandung: PT. Syaamil Media, 2003),

Zeni Yuserli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015)